

PENGARUH PEMANFAATAN MEDIA KOMUNIKASI TERHADAP KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA MASYARAKAT PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH (PBPU) DI DIY

Oleh :

Wuri Rahmawati

*Dosen Program Studi Komunikasi
Fakultas Ekonomi, Ilmu Sosial dan Humaniora
Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta
wurirahma_w@unisayogya.ac.id*

intisari

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mendorong masyarakat Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) untuk menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan menganalisis pengaruh media yang digunakan untuk mendorong masyarakat menjadi peserta JKN. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dengan sampel masyarakat PBPU yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mendorong masyarakat PBPU menjadi peserta JKN adalah merasa penting sebesar 100%, premi murah sebesar 100%, pendapatan cukup sebesar 57,14 dan mendapatkan fasilitas berobat gratis sebesar 71,42%. Masyarakat menjadi peserta JKN sejak tahun 2014 sebanyak 28,57%, tahun 2015 sebanyak 57,14% dan sejak tahun 2016 sebanyak 14%. Tahun 2014 merupakan awal pencanangan program JKN oleh pemerintah sehingga belum banyak masyarakat yang mendaftarkan menjadi peserta JKN karena masih terbatasnya informasi yang diterima masyarakat.

Peserta JKN menyatakan sudah pernah memanfaatkan kartu BPJS kesehatan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan baik di fasilitas kesehatan Tingkat pertama (FKTP) maupun di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut (FKRTL) sebesar 86%. Sedangkan yang 14% belum pernah memanfaatkan karena kondisi kesehatan keluarganya baik-baik saja selama ini.

Sumber informasi mengenai JKN paling banyak dari *indirect communication* melalui media massa baik elektronik maupun media cetak (televisi, radio, surat kabar, leaflet) sebesar 42,12%, melalui *hybrid media* (internet) sebesar 5,26% dan dari *direct communication* melalui media interpersonal (tatap muka) baik informasi dari teman atau tetangga, pertemuan RT/PKK dan Kepada Desa/Kepala Dusun/Tokoh Masyarakat sebesar 56,52%. Fakta ini menunjukkan bahwa di era modern yang serba digital dan online seperti saat ini, media interpersonal tetap lebih efektif dalam menginformasikan, mengedukasi dan mempengaruhi masyarakat untuk menjadi peserta JKN dibandingkan dengan media massa dan *hybrid media*.

Masyarakat memperoleh informasi dari berbagai media tersebut antara lain mengenai cara pendaftaran sebesar 85,7%, premi bulanan sebesar 100%, cara pembayaran

sebesar 100%, manfaat yang diperoleh 100%, fasilitas kesehatan mitra BPJS Kesehatan 71,43%, cara memanfaatkan kartu JKN 100%, biaya yang ditanggung 85,7% dan cara komplain 42,9%.

Pemanfaatan media komunikasi berpengaruh terhadap pengetahuan masyarakat terhadap program JKN dan mampu mendorong masyarakat untuk menjadi peserta dengan membayar premi bulanan di kelas III perawatan yaitu sebesar Rp 25.500,- per bulan

Kata kunci: Pengaruh, Pemanfaatan media, Kepesertaan, Jaminan Kesehatan Nasional

Abstract

The objectives of this research are to analyze the factors that motivate the society of Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) to become the users of the National Health Assurance (Jaminan Kesehatan Nasional/JKN), and to analyze the media impact used to motivate the society. This research is a descriptive one, with the sample of the society of PBPU converting to the National Health Assurance within the area of Daerah Istimewa Yogyakarta.

The result of the research shows that the factors that motivate the conversion (PBPU to JKN) include 'such conversion is important' (100%), 'low premium' (100%), 'sufficient income' (57,14%), and 'for the free health care' (71,42%). The progress of the conversion from PBPU to JKN can be seen from year to year. In 2014, the percentage of people who converted was 28,57%. In 2015, 57,14%. And, since 2016, 14%. The users of JKN admitted that they had used the card of BPJS for health to check-up their health condition either in Elementary Health Service Facility (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama/FKTP) or Advanced Reference Health Facility (Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut/FKRTL), as many as 86%. Mean while the 14% of the users have not used such facility for the reason of not having any health problem thus far.

The source of information about JKN is mostly from indirect communication via mass media either online or printed such as television, radio, newspaper, and leaflet (42,12%), via hybrid media or internet (5,26%), and also direct communication via interpersonal media (face-to-face) either from a friend or a neighbor such as the meeting of RT/PKK and Kepala Desa/Kepala Dusun/Tokoh Masyarakat (56,52%). This fact shows that in such modern era that is very attached to the internet and digital matters, interpersonal media shows its strong effectiveness in informing, educating, and influencing the society to become the users of JKN, if compared to how mass media and hybrid media perform. The society received the information from all the mentioned media to find out how to register (85,7%), number of premium (100%), payment method (100%), benefits (100%), facilities offered in BPJS for Health (71,43%), how to use JKN card (100%), fees (85,7%), and how to complain (42,9%). The use of communication media showed some impact toward the public knowledge about the JKN program and managed to motivate the people to convert to JKN by paying a monthly premium of class III service which is Rp25.500,-/month.

Keywords: *Impact, Use of Media, Participation, National Health Assurance*

A. PENDAHULUAN

Jaminan Kesehatan Nasional merupakan program nasional yang berlaku bagi seluruh penduduk Indonesia. Jaminan Kesehatan Nasional ini mulai dilaksanakan sejak tahun 2014 dan ditargetkan tahun 2019 seluruh penduduk Indonesia sudah menjadi peserta. Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional tertuang dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Jaminan Kesehatan Nasional, disingkat program JKN merupakan suatu program pemerintah dan masyarakat dengan tujuan memberikan kepastian kesehatan yang menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia agar penduduk Indonesia dapat hidup sehat, produktif dan sejahtera.

Untuk menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional, ada prosedur yang harus dilalui oleh masyarakat. Masyarakat yang telah terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional berhak mendapatkan manfaat dalam pelayanan kesehatan perseorangan berupa tindakan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif termasuk obat dan bahan medis di fasilitas-fasilitas kesehatan yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Masyarakat juga berhak menyampaikan keluhan jika tidak memperoleh layanan yang baik pada saat melakukan pemeriksaan di fasilitas kesehatan, kesulitan melakukan klaim atas biaya pemeriksaan, dan sebagainya.

Kegiatan sosialisasi tentang program Jaminan Kesehatan Nasional menjadi hal yang mutlak harus dilakukan agar masyarakat memiliki pengetahuan dan pemahaman yang utuh sehingga muncul kesadaran dan dapat mengambil sikap untuk memperoleh jaminan kesehatan dengan menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional. Sosialisasi dapat dilakukan secara langsung (*direct communication*) seperti maupun secara tidak langsung (*indirect communication*). Komunikasi secara langsung dilakukan dengan pertemuan atau rapat baik di tingkat RW/RT/PKK, Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten/Kota, diskusi dengan teman, tetangga, tokoh masyarakat, kader kesehatan, dan sebagainya. Komunikasi tidak langsung dilakukan melalui media yaitu pesan disampaikan oleh sumber melalui media tertentu seperti *handphone*., internet (media sosial dan media online), baliho, spanduk, leaflet, televisi, radio dan sebagainya.

Dalam *direct communication* bentuk komunikasinya termasuk komunikasi interpersonal baik antar pribadi maupun dalam kelompok. Komunikasi interpersonal yaitu proses pengiriman dan penerimaan pesan-pesan antara dua orang atau sekelompok kecil orang dengan beberapa efek dan umpan balik. Proses komunikasi dapat berlangsung secara dialogis yang memungkinkan terjadinya interaksi dan umpan balik (*feedback*) langsung, pihak atau orang yang terlibat dapat melakukan dua peran sekaligus yaitu sebagai pembicara dan sebagai penerima secara bergantian melalui tatap muka (Devito, 1997 dalam Dilla, 2007). Proses komunikasi interpersonal dianggap beberapa pakar komunikasi sebagai bentuk komunikasi paling efektif untuk mengubah sikap, kepercayaan dan opini masyarakat (Dilla, 2007).

Dalam *indirect communication* bentuk komunikasinya termasuk komunikasi massa. Komunikasi massa adalah komunikasi yang berlangsung dengan menggunakan media massa yang dikelola secara melembaga, yang ditujukan untuk sejumlah besar orang tak terbatas dan heterogen, pesannya bersifat umum, cepat, serentak dan seketika (Dilla, 2007). Komunikasi massa adalah komunikasi yang ditujukan pada khalayak luas, pesan-pesan disampaikan secara cepat melalui media audio dan atau visual yang dapat terjadi secara satu arah ataupun dua arah (Devito, 2010).

Media sebagai sarana yang tidak dapat diabaikan dalam membentuk pola-pola tingkah laku individu. Dengan media individu memperoleh gambaran dan pola hidup masyarakat, memberikan strategi dan dorongan dalam menghadapi kenyataan di hadapannya. Tulisan-tulisan, pesan-pesan dalam media secara langsung diinternalisasi oleh pembaca (khalayak) dan kemudian secara tidak sadar menjadikan bagian dalam dirinya (Rudito & Famiola, 2008). Media komunikasi banyak digunakan oleh berbagai pihak dengan berbagai tujuan antara lain untuk mensosialisasikan sebuah program atau produk, untuk berkampanye dan sebagainya.

Direct communication maupun *indirect communication* menjadi sarana penting dalam menyebarkan informasi berkaitan dengan prosedur menjadi peserta, manfaat menjadi peserta, prosedur klaim dan komplain, fasilitas-fasilitas kesehatan yang melayani peserta Jaminan Kesehatan Nasional, dan sebagainya. Dengan sosialisasi yang intensif maka kesadaran masyarakat untuk menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional khususnya dari kelompok Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) baik. Dengan kesadaran yang baik maka masyarakat PBPU dapat mengambil sikap (keputusan) untuk menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional.

Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang mendorong masyarakat Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) untuk menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan menganalisis pengaruh media yang digunakan untuk mendorong masyarakat menjadi peserta JKN.

B. METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan *mixed method* (kuantitatif dan kualitatif). Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang mempunyai tujuan mendeskripsikan atau menggambarkan sebuah fenomena secara sistematis dan faktor-faktor yang mempengaruhinya (Thyer, skriptif, 2001:132). Data kuantitatif disajikan dalam bentuk statistik deskriptif sedangkan data kualitatif disajikan untuk memperkuat penjelasan atau analisis data kuantitatif. Sampel penelitian berjumlah 50 orang masyarakat Pekerja Bukan Penerima Upah yang telah menjadi peserta JKN, ditandai dengan kepemilikan kartu JKN Lokasi penelitian di Daerah Istimewa Yogyakarta.

C. PEMBAHASAN

a. Profil Masyarakat Bukan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Profil masyarakat menggambarkan umur, pendidikan, jumlah tanggungan keluarga dan rata-rata pendapatan per bulan. Berdasar hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat peserta JKN berumur 40 tahun, pendidikan SMU, jumlah tanggungan keluarga 2 orang (1 laki-laki, 1 perempuan) dengan pendapatan Rp 1.435.714,- (Satu Juta Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Empat Belas Rupiah) per bulan. Menurut umur, masyarakat peserta JKN berusia produktif artinya usia pekerja yang setiap saat menghasilkan barang dan atau jasa sehingga kepesertaannya dalam JKN sangat penting agar setiap saat perlu menjalani pengobatan atau perawatan kesehatan tidak perlu mengeluarkan biaya.

Tingkat pendidikan rata-rata yaitu Sekolah Menengah Umum (SMU) menunjukkan bahwa masyarakat peserta JKN telah memiliki kemampuan untuk membaca, menulis sehingga memiliki kemampuan untuk menerima informasi yang berasal dari media tertulis seperti majalah, koran, spanduk, leaflet, dan sebagainya.

Masyarakat peserta JKN sudah pernah memanfaatkan kartu JKN untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan merasa mudah. Hanya ketika harus periksa ke rumah sakit masyarakat perlu mencari rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama (puskesmas, dokter keluarga, dan sebagainya) dan antrian pemeriksaan yang lama. Masyarakat mendaftar menjadi peserta JKN untuk kelas III rata-rata sejak tahun 2015 sehingga setiap bulan per orang membayar premi sebesar Rp 25.500,- (Dua Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah). Pilihan pembayaran premi terendah karena masyarakat menyesuaikan dengan kemampuan keuangan keluarganya.

b. Pengetahuan dan Sumber Informasi Masyarakat Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tentang JKN

Pengetahuan adalah sesuatu yang diketahui oleh seseorang melalui pengenalan sumber informasi, ide yang diperoleh sebelumnya baik secara formal melalui jenjang pendidikan maupun informal melalui berbagai media atau saluran komunikasi seperti seminar, workshop, pertemuan, membaca dan mendengar melalui media cetak, elektronik, media sosial dan sebagainya. Berkaitan dengan pendidikan formal, semakin tinggi pendidikan maka pengetahuannya semakin luas (Rahmawati, 2016: 140). Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pendidikan formal masyarakat PBPU peserta JKN adalah SMU/A sehingga menurut peneliti masyarakat memiliki kemampuan untuk mengetahui berbagai informasi yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung (*direct and indirect communication*). Pengetahuan yang dimaksud dalam kajian ini berkaitan dengan tahu dan tidak tahu tentang program JKN. Menurut hasil penelitian bahwa 92% masyarakat tahu tentang JKN dan 8% tidak tahu karena hanya ikut-ikutan teman atau saudara atau tetangga untuk menjadi peserta JKN.

Menurut hasil penelitian, dari total responden menunjukkan bahwa masyarakat menjadi peserta JKN sejak tahun 2014 sebanyak 28,57%, tahun 2015 sebanyak 57,14% dan sejak tahun 2016 sebanyak 14%. Tahun 2014 merupakan awal pencanangan program JKN oleh pemerintah sehingga belum banyak masyarakat yang mendaftarkan menjadi peserta JKN karena masih terbatasnya informasi yang diterima masyarakat.

Kepesertaan JKN ditandai dengan kepemilikan kartu BPJS kesehatan yang diberikan kepada setiap orang per orang. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa 86% masyarakat sudah pernah memanfaatkan kartu BPJS kesehatan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan baik di fasilitas layanan kesehatan pertama (FKTP) maupun di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut (FKRTL). Sedangkan yang 14% belum pernah memanfaatkan karena kondisi kesehatan keluarganya baik-baik saja selama ini.

Pengetahuan masyarakat tentang JKN berasal dari berbagai sumber informasi baik berasal dari *direct communication* maupun *indirect communication*. Berdasar hasil penelitian, masyarakat memperoleh dari satu sumber sebagaimana terlihat dalam tabel 1 berikut :

Tabel 1. Sumber Informasi Masyarakat Peserta JKN tentang Program Jaminan Kesehatan Nasional

No	Sumber Informasi	Prosentase (%)
1	Televisi	26,3
2	Radio	5,26
3	Surat Kabar	5,26
4	Internet	5,26
5	Leaflet	5,26
6	Spanduk	0
6	Kepala Desa/Kepala Dusun/Tokoh Masyarakat	10,53
7	Pertemuan RT/PKK	15,79
8	Kader Kesehatan/Posyandu/Lansia	5,26
9	Teman/Tetangga	21,03
10	Lainnya	0

Sumber : Data Primer Terolah, 2017

Tabel 1 menunjukkan bahwa masyarakat paling banyak mendapatkan informasi mengenai program JKN dari *indirect communication* melalui media massa baik elektronik maupun media cetak (televisi,radio,surat kabar,leaflet) sebesar 42,12%, melalui *hybrid media* (internet) sebesar 5,26% dan dari *direct communication* melalui media interpersonal antar pribadi maupun kelompok (tatap muka) baik informasi dari teman atau tetangga, pertemuan RT/PKK dan Kepada Desa/Kepala Dusun/Tokoh Masyarakat sebesar 56,52%. Fakta ini menunjukkan bahwa di era modern yang serba digital dan online seperti saat ini, media interpersonal tetap lebih efektif dalam menginformasikan, mengedukasi dan mempengaruhi masyarakat untuk menjadi peserta JKN dibandingkan dengan media massa dan *hybrid media*. *Hybrid media* merupakan media komunikasi yang mengkombinasikan perangkat dari media massa dan dari komunikasi interpersonal, yang potensial menjangkau audiens secara luas di beberapa lokasi berbeda, tetapi juga memberikan kesempatan interaktif antara pengirim pesan (*sender*) dan penerima pesan (*receiver*) misalnya teknologi internet (Leuwees, Cees: 2004)

Informasi JKN melalui media massa paling banyak atau besar diterima masyarakat melalui media televisi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin sering terpapar informasi

program JKN melalui media televisi maka masyarakat akan mudah mengetahui dan menerima informasi yang disampaikan. Dalam sehari semalam (24 jam), rata-rata masyarakat menonton televisi 5 jam. Sedangkan untuk media spanduk ternyata kurang efektif dalam penyampaian informasi tentang JKN sebab tidak ada yang menyampaikan bahwa mendapatkan informasi melalui spanduk meskipun dapat dijumpai beberapa spanduk yang terpampang di tempat-tempat umum. Selain itu, fakta tersebut juga menunjukkan bahwa masyarakat memiliki budaya mendengar dan melihat lebih yang lebih tinggi daripada budaya membaca. Menurut UNESCO (2012) minat baca masyarakat Indonesia sebesar 0,001% artinya setiap 1000 orang hanya ada 1 orang yang memiliki minat untuk membaca (Materi seminar Bapak Muqowwim, 29 Maret 2017, UNISA Yogyakarta).

Sedangkan informasi melalui media interpersonal paling besar atau banyak diterima masyarakat melalui teman atau tetangga. Hal ini karena adanya kejelasan informasi yang diterima ketika masyarakat berdiskusi dengan teman atau tetangga yang telah menjadi anggota JKN. Kejelasan informasi dapat berpengaruh terhadap keyakinan dan sikap masyarakat untuk menjadi peserta JKN. Media interpersonal dari mulut ke mulut menjadi media yang paling efektif dalam menyampaikan informasi terkait program JKN sebab media interpersonal mempunyai kekuatan untuk membujuk atau mengajak atau persuasi sehingga dengan media ini *feedback* dapat terjadi secara langsung (Rahmawati, W, 2014). Pemanfaatan media interpersonal perlu untuk dioptimalkan dan ditingkatkan dalam menyampaikan informasi program JKN kepada masyarakat luas terutama melalui pertemuan rutin yang ada di masyarakat seperti pertemuan PKK maupun pertemuan RT yang umumnya dilakukan sebulan sekali. Rahmawati (2017) menyampaikan bahwa untuk meningkatkan minat masyarakat menjadi peserta JKN maka optimalisasi pemanfaatan media interpersonal perlu untuk ditingkatkan terutama melalui pertemuan-pertemuan rutin yang ada di masyarakat, BPJS Kesehatan harus fleksibel menyesuaikan waktu pertemuan warga dalam menyampaikan informasi, memberikan edukasi dan mengajak masyarakat untuk menjadi peserta JKN.

Adapun informasi yang diperoleh masyarakat melalui berbagai sumber informasi tersebut terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 2. Informasi yang diperoleh Masyarakat Peserta JKN terkait Program Jaminan Kesehatan Nasional

No	Informasi/Pesan	Prosentase (%)
1	Cara mendaftar	85,7
2	Besar Premi bulanan	100
3	Cara Pembayaran	100
4	Manfaat yang diperoleh	100
5	Fasilitas kesehatan mitra BPJS Kesehatan	71,43
6	Cara memanfaatkan kartu JKN	100
7	Biaya yang ditanggung	85,7
8	Cara Komplain	42,9

	Rata-rata	85,7
--	-----------	------

Sumber : Data Terolah, 2017

Berdasar tabel 2 terlihat bahwa masyarakat peserta JKN telah mendapatkan informasi yang baik terkait program JKN. Namun demikian masyarakat belum mengetahui secara detail dan menyeluruh sehingga merasa kebingungan untuk beberapa hal terutama tentang tata cara pendaftaran, fasilitas kesehatan mitra BPJS Kesehatan, biaya yang ditanggung dan cara komplain. Yang masih perlu untuk ditingkatkan adalah informasi terkait cara komplain (prosedur, tempat, waktu komplain), cara pendaftaran dan biaya pengobatan yang ditanggung oleh JKN. Keterbatasan informasi tentang cara komplain seringkali menimbulkan kebingungan ketika masyarakat menghadapi kesulitan atau permasalahan saat memanfaatkan kartu JKN.

Dengan informasi yang baik, maka pengetahuan masyarakat tentang program JKN semakin utuh sehingga menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya jaminan kesehatan. Kesadaran tersebut mampu mendorong masyarakat untuk menjadi peserta JKN. Adapun alasan masyarakat menjadi peserta JKN terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 3. Alasan Masyarakat Menjadi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional

No	Alasan menjadi Peserta BPJS Kesehatan	Prosentase (%)
1	Merasa penting	100
2	Premi murah	100
3	Pendapatan cukup	57,14
4	Biaya berobat gratis	71,42
5	Lainnya	0

Sumber : Data Terolah, 2017

Berdasar tabel 3 seluruh responden menyampaikan bahwa program JKN ini penting untuk diri dan anggota keluarganya sehingga setiap saat harus melakukan pemeriksaan kesehatan tidak terbebani dengan keperluan biaya yang besar. Bagi masyarakat dengan menjadi peserta JKN maka kebutuhan kesehatan diri dan anggota keluarganya telah dijamin oleh BPJS Kesehatan. Kesadaran ini menumbuhkan cara berpikir yang positif dari masyarakat terkait kewajiban membayar premi bulanan. Menurut masyarakat "*jer basuki mowo beo*" artinya setiap hal yang diinginkan pasti memerlukan biaya untuk mencapai atau menikmatinya. Sehingga masyarakat merasa bahwa premi Rp 25.500,- per orang per bulan tergolong murah jika dibandingkan dengan manfaat yang akan diperoleh ketika melakukan pemeriksaan atau bahkan pengobatan.

Masyarakat peserta JKN mampu membayar premi bulanan untuk kelas III perawatan di Rumah Sakit. Hal ini berkaitan dengan kemampuan pendapatan keluarga untuk memenuhi semua kebutuhan mulai dari konsumsi harian, pendidikan, biaya sosial dan biaya kesehatan. Dengan rata-rata anggota keluarga 2 orang maka setiap bulan masyarakat harus menyisihkan pendapatan keluarganya sebesar Rp 76.500,- (Tujuh Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) untuk membayar premi JKN. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa hanya 57,14% yang beralasan menjadi peserta JKN karena pendapatannya cukup. Fakta ini mengindikasikan bahwa tingkat pendapatan keluarga berpengaruh pada kemampuan untuk membayar premi bulanan setiap peserta JKN.

Berdasar uraian pembahasan di atas terlihat bahwa pemanfaatan media komunikasi dalam sosialisasi program JKN berpengaruh terhadap masyarakat PBPU untuk menjadi peserta JKN, menumbuhkan kesadaran terhadap manfaat yang akan diperoleh sehingga merelakan sebagian pendapatan keluarga untuk ebayar premi bulanan sebesar Rp 25.500,-

D. KESIMPULAN

a. Simpulan

1. Faktor-faktor yang mendorong dan menjadi alasan masyarakat PBPU untuk menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional yaitu masyarakat merasa bahwa JKN penting bagi diri dan keluarganya, premi murah, pendapatan cukup dan mendapatkan fasilitas berobat gratis.
2. Sosialisasi dan edukasi mengenai program JKN melalui media komunikasi interpersonal baik antar pribadi maupun kelompok lebih berpengaruh dibandingkan dengan sosialisasi melalui media massa maupun *hybrd media*. Di era digital yang serba online, komunikasi tatap muka tetap lebih efektif mempengaruhi atau mempersuasi masyarakat PBPU untuk menjadi peserta JKN.

b. Saran

1. Dalam upaya terus meningkatkan kesadaran tentang pentingnya JKN bagi masyarakat dan anggota keluarganya maka BPJS Kesehatan harus melakukan komunikasi persuasif kepada masyarakat luas khususnya masyarakat PBPU sehingga target nasional dapat tercapai yaitu tahun 2019 semua masyarakat Indonesia telah menjadi peserta JKN. Komunikasi persuasif tersebut dilakukan dengan memaksimalkan pertemuan-pertemuan rutin yang ada di masyarakat.
2. Perlu kajian lebih lanjut mengenai dampak kepesertaan masyarakat pada program JKN baik dari aspek layanan kesehatan (prosedur dan kecepatan layanan terhadap masyarakat peserta JKN, pemahaman tenaga kesehatan maupun non kesehatan di FKTP maupun FKRTL tentang pemanfaatan JKN) maupun kondisi kesehatan peserta JKN dengan mengkaitkan bahwa program JKN mencakup kegiatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Devito, J., 2010, *Komunikasi Antar Manusia edisi kelima*, Profesional Book, Jakarta.
- Leuwis, C., 2004, *Communication for rural Innovation : Rethinking Agricultural Extension Third Edition*, Blackwell Science. London
- Rahmawati, Wuri. 2014. Peran Media Komunikasi dalam Tanggap Bencana Banjir Lahar Dingin di Sungai Code Kota Yogyakarta. *Jurnal Penanggulangan Bencana* Vol 5, Nomor 1, Tahun 2014.

- Rahmawati, Wuri. 2016. Peran Media Komunikasi Terhadap Kepesertaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Informal. *Jurnal Health Studies*. Vol 1, Nomor 2. September 2016. Hal 130-147
- Dilla, S., 2007, *Komunikasi Pembangunan*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung
- Thyer.A.Bruce (Editor) (2001). *The Handbook of Sosial Work Research Methode*. Sage Pulication.Inc. United States of America: *Library of Congress Cataloging-in-Publication Data*
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)